

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN (PSAK NO. 27) PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH MAMBAUL HIDAYAH DI SIAK

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensif Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru
Riau*



OLEH :

SELAMET MUJANI
10873003166

**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI KEUANGAN**

**JURUSAN AKUNTANSI S-1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN (PSAK NO.27) PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH MAMBAUL HIDAYAH DI SIAK

Oleh : Selamat Mujani
10873003166

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2009.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis tatacara penyajian Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mambaul Hidayah Siak kemudian membandingkan dengan PSAK No. 27 Tahun 2009. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yaitu melalui wawancara dengan pengurus koperasi dan data sekunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut yang bersumber dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah Siak, seperti Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Struktur Organisasi dan dokumen yang berkenaan dengan sejarah singkat Koperasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa kekurangan dari Laporan Keuangan yang disajikan oleh koperasi yaitu koperasi memisahkan antara perkiraan kas dan perkiraan bank, koperasi tidak memisahkan antara piutang usaha baik yang berasal dari anggota maupun dari non anggota, koperasi tidak memisahkan antara tanah bangunan, koperasi tidak melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap, koperasi belum menyajikan Laporan Arus Kas serta Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Dari kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis, hendaknya koperasi menggabungkan antara perkiraan kas dan perkiraan bank, memisahkan antara piutang usaha baik yang berasal dari dari anggota maupun non anggota, melakukan pemisahan antara tanah dan bangunan, melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap, serta koperasi harus menyajikan unsur-unsur laporan keuangan yang meliputi Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Kata Kunci: PSAK No. 27 Tahun 2009.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA		
A. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi	13
B. Gambaran Umum Akuntansi	18
C. Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan Koperasi	20
D. Karakteristik Penilaian dan Penyajian Laporan Neraca	24
E. Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi	37
F. Penyajian Laporan Arus Kas Koperasi	40
G. Penyajian Laporan Promosi Anggota Koperasi	43
H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi	45
I. Koperasi Dalam Pandangan Islam	46
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI		
A. Sejarah Singkat Koperasi	49

B. Struktur Organisasi	50
C. Aktivitas Usaha KJKS Mmambaul Hidayah	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode Pencatatan	56
B. Penilaian dan Penyajian Neraca	56
C. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha	68
D. Penyajian Laporan Arus Kas	72
E. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota	75
F. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel I.1	3
Tabel I.2	4
Tabel I.3	5
Tabel I.4	6
Tabel I.5	7
Tabel I.6	9

BAB II

Tabel II.1	36
Tabel II.2	39
Tabel II.3	41
Tabel II.4	42
Tabel II.5	44

BAB III

BAB IV

Tabel IV.1	67
Tabel IV.2	72
Tabel IV.3	74
Tabel IV.4	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri yang berakar dalam masyarakat serta mampu memajukan ekonomi anggotanya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, jika badan usaha lain memiliki misi dan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya demi kelangsungan operasional perusahaan sedangkan koperasi memiliki misi dan tujuan sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitar koperasi tersebut.

Sebagaimana halnya pada perusahaan, koperasi juga membuat laporan keuangan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan koperasi. Secara garis besar laporan keuangan koperasi tidak berbeda dengan laporan keuangan badan usaha lainnya, perbedaan yang ada hanya terletak pada perkiraan-perkiraan tertentu seperti perkiraan modal dimana untuk koperasi modal tersebut terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah. Kemudian pada badan usaha lain dikenal istilah saldo laba sedangkan pada usaha koperasi disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU.

Laporan keuangan koperasi merupakan laporan mengenai pertanggungjawaban kegiatan usaha kepada pihak luar yang mempunyai hubungan dengan koperasi. Laporan keuangan koperasi menurut Standar

Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 2009 tentang perkoperasian terdiri dari :

(1) Neraca yang menggambarkan jumlah aset dalam pengelolaan, kewajiban kepada kreditur koperasi, kekayaan bersih dari koperasi. (2) perhitungan hasil usaha yang menggambarkan kegiatan operasi dan hasil operasi koperasi dalam periode tertentu. (3) laporan arus kas yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. (4) laporan promosi ekonomi anggota yang menggambarkan manfaat koperasi bagi anggotanya. (5) catatan atas laporan keuangan mengenai kebijaksanaan akuntansi dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan.

Pada koperasi pencatatan, penilaian dan penyajian setiap transaksi yang terjadi sebaiknya memisahkan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan transaksi dengan non anggota, pendapatan tersebut juga sebaiknya dipisahkan berdasarkan jenis bidang usaha koperasi. Hal ini bertujuan agar jumlah maupun nilai transaksi dari anggota dapat merupakan salah satu petunjuk penting tentang manfaat yang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.

Transaksi penjualan dari anggota, pada akhirnya nanti sebagian dibagi untuk anggota dengan jumlah sebanding dengan jasa yang diberikan kepada anggota. Sisa setelah dibagi kepada anggota dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja dan dana sosial. Sedangkan penjualan dengan bukan anggota, dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana karyawan, pegawai, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja dan dana sosial.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah merupakan koperasi yang memberikan jasa keuangan dengan bidang usaha simpan pinjam, usaha pembiayaan dan juga menerima penjualan kelapa sawit. Anggota koperasi ini adalah semua pengurus koperasi dan juga masyarakat umum yang terdaftar sebagai anggota simpan pinjam koperasi. Sedangkan yang bukan anggota adalah masyarakat sekitar Kecamatan sabak Auh dan Siak yang melakukan transaksi jual beli dengan koperasi tetapi tidak menjadi anggota Koperasi KJKS Mambaul Hidayah.

1. Dalam **PSAK No. 27 (IAI No. 27)** dalam penyusunan laporan keuangan pada aktiva lancar antara perkiraan kas dengan perkiraan bank tidak dipisah. Tetapi dalam laporan keuangan KJKS Mambaul Hidayah antara kas dengan bank dipisahkan. Seharusnya uang kas dan bank berjumlah Rp. 438.983.033,- dipisah menjadi kas ditangan Rp. 17.031.171,- dan Kas di bank Rp. 421.951.862,-. Sedangkan menurut PSAK No. 27 dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut:

Koperasi Pembangunan Rakyat

Neraca

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1

Aktiva Lancar			Kewajiban Lancar
	Rp	Rp	
Kas dan Bank	xxxx	xxxx	

Sumber: PSAK No. 27

Akibatnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PSAK N0. 27 sehingga akan mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan ketika diaudit oleh auditor independen.

2. Dalam penyusunan Neraca saldo pada aktiva lancar yang seharusnya piutang terbagi menjadi empat bagian, yaitu: piutang usaha, piutang anggota, piutang non anggota dan piutang lain-lain. Koperasi hanya mencatat piutang anggota sebesar Rp. 841.611.925,- dan piutang non anggota sebesar Rp. 121.038.443,-. Seharusnya KJKS Mambaul Hidayah mencatat piutang usaha sebesar Rp. 221.111.643,-, piutang anggota sebesar Rp. 701.500.725,- dan piutang non anggota sebesar Rp. 40.038.000,-. Adapun pencatatannya menurut PSAK No. 27 dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini:

Koperasi Pembangunan Rakyat			
Neraca			
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20x1			
Aktiva Lancar	Rp	Rp	Kewajiban
Lancar			
Kas dan Bank	xxxx	xxxx	
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx	
Piutang Usaha	xxxx	xxxx	
Piutang Pinjaman Anggota	xxxx	xxxx	
Piutang Pinjaman Non Anggota	xxxx	xxxx	

Sumber: PSAK No. 27

3. Dalam penyusunan Neraca saldo pada aktiva tetap yang seharusnya antara tanah dan bangunan dipisah tetapi dalam laporan Neraca KJKS Mambaul Hidayah digabung. Seharusnya nilai tanah Rp. 39.957.000,- dan bangunan Rp. 60.043.000,- ditulis tanah dan bangunan Rp. 100.000.000,-. Sehingga mengakibatkan pembaca laporan keuangan tidak mengetahui berapa nilai tanah dan berapa nilai bangunan. Sedangkan menurut PSAK No. 27 Tahun 2009 tanah dan bangunan dipisah dalam pencatatannya. Akibatnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PSAK No.27 sehingga akan mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan dan menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan serta pembaca laporan keuangan. Adapun pencatatannya menurut PSAK No. 27 dapat dilihat pada tabel I.3 berikut ini:

Aktiva Tetap		Ekuitas
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxx	
Bangunan		xxxx

Sumber: PSAK No. 27

4. Koperasi juga tidak melakukan penyusutan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh koperasi sendiri, dalam penyusutan aktiva tetap sebesar 5% dari nilai bangunan, peralatan kantor dan peralatan usaha sebesar 12,5% / tahun, sedangkan untuk kendaraan/mobil penyusutan sebesar 20% / tahun. Akibatnya nilai aktiva tetap bernilai terlalu tinggi dan akan menyesatkan bagi para pembaca laporan keuangan serta tidak sesuai dengan PSAK No. 27 sebagai pedoman untuk mencatat laporan keuangan

koperasi. Sedangkan menurut PSAK No. 27 dapat dilihat pada tabel I.4 berikut ini:

Aktiva Tetap		Ekuitas
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxx	
Bangunan		xxxx
Mesin	xxxx	
Inventaris		xxxx
Akumulasi Penyusutan	xxxx	

Sumber: PSAK No. 27

5. Dalam laporan keuangan Koperasi KJKS Mambaul Hidayah juga belum menyajikan laporan promosi ekonomi anggota yang menggambarkan peningkatan ekonomi anggota dari waktu ke waktu berdasarkan kegiatan operasional koperasi. Dampaknya anggota koperasi tidak mengetahui antara selisih harga jual menurut harga pasar dengan harga jual menurut koperasi, selisih penghematan beban peminjaman dengan koperasi dan kelebihan balas jasa simpanan anggota atau keuntungan lainnya disesuaikan dengan kegiatan koperasi.

Adapun pencatatannya menurut PSAK No. 27 dapat dilihat pada tabel I.5 berikut ini:

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Konsumen)

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X0
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar		(xxxx)
(xxxx)		
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi		
Pemasaran Produk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxx	Rp xxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi		
Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM		
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
- Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan		
Jasa Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama		
Tahun Berjalan	Rp xxxx	Rp xxxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan		
Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx

Sumber: PSAK No. 27

6. Koperasi juga belum mencantumkan laporan arus kas selama 1 (satu) periode, sehingga tidak tersedia informasi keuangan sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setoran kas, serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Sedangkan menurut PSAK No. 27 tahun 2009 mengenai akuntansi perkoperasian, laporan arus kas tersebut perlu disajikan untuk mengetahui informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber

penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Dampak lainnya dengan tidak adanya laporan arus kas adalah tidak adanya informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dan aktivitas operasi, tidak terdapatnya pencatatan arus kas dari aktivitas investasi dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Adapun pencatatan laporan arus kas menurut PSAK No. 27 tahun 2009 dapat dilihat pada tabel I.6 berikut ini:

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT

LAPORAN ARUS KAS (Metode Langsung)
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20x1

Dalam Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	xxxxx	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(xxxxx)</u>	
Kas yang dihasilkan operasi	xxxxx	
Pembayaran bunga	(xxxxx)	
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(xxxxx)</u>	
Arus kas sebelum pos luar biasa	xxxxx	
Hasil dari asuransi karena gempa bumi	<u>xxxxx</u>	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		xxxxx
Arus kas dari aktivitas operasi	(xxxxx)	
Perolehan anak perusahaan x dengan kas	(xxxxx)	
Hasil penjualan peralatan	xxxxx	
Penerimaan bunga	xxxxx	
Penerimaan deviden	<u>xxxxx</u>	
Arus kas yang digunakan untuk investasi		xxxxx
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxxx	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxxx	
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxxx)	
Pembayaran deviden *	<u>(xxxxx)</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas penadanaan		
Kenaikan bersih kas dan setara kas		<u>xxxxx</u>
Kas dan setara kas awal periode		xxxxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		xxxxx

*Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

Sumber: PSAK No. 27

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul: **"ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN (PSAK NO. 27) PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH MAMBAUL HIDAYAH SIAK"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis membuat suatu perumusan masalah, yaitu : "Apakah penerapan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS Mambaul Hidayah) di Siak telah sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009".

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS Mambaul Hidayah) di Siak telah menerapkan akuntansi perkoperasian sesuai PSAK No. 27 Tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, menambah wawasan dalam penerapan akuntansi perkoperasian.
- b. Bagi pengurus koperasi, memberi masukan mengenai penerapan akuntansi perkoperasian.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS Mambaul Hidayah) di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kab. Siak.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengurus koperasi mengenai kegiatan usaha, sejarah koperasi, struktur organisasi dan aktivitas usaha Koperasi KJKS Mambaul Hidayah di Siak.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah disusun sebelumnya oleh pihak koperasi dalam bentuk yang sudah jadi berupa laporan keuangan koperasi (KJKS Mambaul Hidayah).

Sumber data berasal dari koperasi jasa keuangan syariah mambaul hidayah dengan meminta langsung kepada bagian keuangan koperasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah :

- Dokumentasi yaitu dengan memfoto copy data keuangan koperasi KJKS Mambaul Hidayah yang terdiri dari Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha dan catatan atas laporan keuangan.
- Wawancara langsung dengan ketua koperasi tentang sejarah berdirinya koperasi dan hal-hal mengenai koperasi KJKS Mambaul Hidayah.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun menjadi beberapa pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) pembahasan, untuk lebih jelasnya penulisan proposal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : Pembahasan ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis dan sumber data dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam pembahasan ini dikemukakan mengenai pengertian dan tujuan koperasi, pengertian dan tujuan akuntansi, laporan karakteristik koperasi, jenis-jenis laporan, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan dan koperasi dalam pandangan islam.

BAB III : Pada pembahasan ini diuraikan mengenai gambaran umum Koperasi, berisikan sejarah singkat Koperasi, struktur organisasi dan aktivitas Koperasi.

BAB IV : Pembahasan , merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penyajian laporan keuangan Pada KJKS Mambaul Hidayah seperti penyajian sisa hasil usaha dan neraca.

BAB V : Penutup, merupakan penutup dari penulisan berisikan kesimpulan penulisan dari penelitian, saran-saran yang ditujukan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mambaul Hidayah serta keterbatasan yang di hadapi penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi

Di Indonesia koperasi diatur dalam **undang-undang No. 12 tahun 1967** yang diperbaharui menjadi **undang-undang No. 25 tahun 1992**. Koperasi didefinisikan sebagai berikut:

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Menurut **Jochen (2002 : 13)** pengertian koperasi sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa (user). Fakta ini yang membedakan koperasi dari badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modalnya.

Menurut **PSAK No. 27 (2009 : 27 . 1)** koperasi dijelaskan sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Sedangkan menurut **Amin Widjaja (2002 : 23)** koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha ini diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Menurut **Kartasapoetra (2003 : 1)** Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.

Menurut **Ginda (2008 : 1)** Muhamad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia pernah mengemukakan: koperasi menurutnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Menurut pemerintah **RI didalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 4** dijelaskan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Disamping fungsi dan peran koperasi dalam **UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 (hal 4)** juga diatur prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendirian koperasi.
 - b. Kerja antar koperasi.

Untuk memperlancar kegiatan operasionalnya maka koperasi harus memiliki kelengkapan organisasi, seperti yang diuraikan dalam **UU No. 25 tahun 1992 pasal 21 (hal 19)** sebagai berikut:

a. Rapat anggota

Secara umum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan manejer. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pencerminan demokrasi dalam yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan serta paham politik

perorangan dan hak suara yang sama pada koperasi primer merupakan azas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.

Menurut **Hendrojogi (2002 : 147)** rapat anggota memiliki tugas dan peran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyerahkan dan menetapkan penyusunan dan perubahan dasar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
3. Memberikan persetujuan dan perubahan dalam masalah struktur dan permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
5. Menetapkan dan mengarahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
7. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus menerima atau menolak.

b. Pengurus koperasi

Dalam **UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 30 (hal 28)** dijelaskan tentang tugas dan peran pengurus koperasi. Adapun tugas pengurus koperasi antar lain:

1. Mengelola koperasi dan usahanya.

2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Penyalenggaraan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota koperasi dan pengawas.

Dan wewenang pengurus meliputi:

1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengabdian.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

c. Pengawas

Adapun tugas dan wewenang pengawas ditegaskan dalam **UU no. 25 tahun 1992 pasal 39 (hal 37)** adalah sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan.

2. Pengawas berwenang:
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

B. Gambaran Umum Akuntansi

Dalam suatu badan usaha baik orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu badan usaha, akuntansi sangat bermanfaat dan menjadi kebutuhan bagi badan usaha tersebut. Kebutuhan itu berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Terdapat berbagai pendapat yang dikemukakan oleh ahli ekonomi sehubungan dengan definisi akuntansi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Akuntansi menurut **Wahyudi (2007 : 7)** adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut **Amin (2002 : 2)** akuntansi merupakan bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut **Harahap (2002 : 3)** akuntansi adalah: Susunan, konsep, definisi, dalil yang menjelaskan hubungan antara variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul.

Sedangkan menurut **Trisnawani (2009 : 29)** akuntansi yang biasa diimplementasikan pada manajemen badan usaha koperasi, yaitu akuntansi sebagai suatu sistem informasi dan akuntansi sebagai suatu teknik prosedur pembukuan transaksi keuangan koperasi.

Sedangkan menurut **Rudianto (2010 : 10)** akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya saja mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada siapa saja yang memerlukan dari informasi tersebut. Dengan demikian akuntansi dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang sifatnya lebih luas dari pada teknik pencatatan semata.

Menurut **Hendrojogi (2002 : 227)** dalam kegiatan usaha di Indonesia kita mengenal berbagai bentuk badan usaha yaitu:

1. Badan usaha perorangan.
2. Badan usaha persekutuan, yang terdiri dari:
 - a. Persekutuan firma.
 - b. Persekutuan Komanditer.
3. Badan usaha Perseroan Terbatas.
4. Badan usaha koperasi.

5. Badan Usaha Milik Negara.

6. Badan Usaha Milik Daerah.

C. Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan Koperasi

Dalam rangka pengembangan prinsip akuntansi koperasi Indonesia menjadi SAK, maka penyertaan prinsip akuntansi Indonesia No.3 tentang akuntansi koperasi telah disesuaikan sebelumnya menjadi PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi, perlunya standar khusus akuntansi untuk ini dikarenakan koperasi memiliki ciri yang berbeda dengan badan usaha lain seperti pemerintah dan swasta, jika ditinjau dari organisasi, cara pengelolanya maupun permodalannya.

PSAK No. 27 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Ruang lingkup **PSAK No. 27 (IAI, 2009 : 27. 3 – 27 .4) :**

1. Pernyataan ini mengatur bagi badan usaha koperasi atas transaksi koperasi yang timbul dari hubungan anggotanya, yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, antar transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, diantara cadangan modal penyertaan, modal sumbangan beban-beban koperasi serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

2. Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggotanya. Transaksi tersebut diperlukan sama dengan transaksi yang terjadi pada badan usaha lainnya.
3. Hal-hal yang bersifat umum atau tidak secara khusus diatur dalam pernyataan ini, termasuk akuntansi untuk unit usaha otonomi koperasi, harus diperlukan dengan mengacu pada PSAK yang lainnya.
4. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk disajikan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan.
5. Pemerintah sebagai salah satu pihak pemakai laporan keuangan koperasi, mungkin memerlukan informasi khusus untuk tujuan tertentu.
6. Berbagai macam jenis koperasi, misalnya koperasi konsumen dan koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran dalam laporan keuangannya dapat menampakkan kekhususan masing-masing dan untuk itu dapat diatur dalam pedoman akuntansi tersendiri dengan mengacu kepada PSAK No. 27 ini.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu agar informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut **IAI (2009 : 7-10)** karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

- a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dapat segera dipahami oleh pemakai.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus hakikat informasi saja tidak cukup untuk menentukan relevansinya.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga yang harus andal atau *reliable*. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faith full representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Penyajian Jujur

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan.

f. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

g. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

h. Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau tidak menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

i. Dapat Dibandingkan

pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative.

Menurut **Arifin (2002 : 20-23)** tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai lainnya.

Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan koperasi adalah:

1. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi
2. Prestasi keuangan koperasi selama satu periode
3. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam satu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan non anggota.
4. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Sedangkan khusus untuk badan usaha koperasi, dalam **Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (IAI 2009 : 12 - 27)** menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari dari laporan-laporan sebagai berikut:

1. Neraca
2. Perhitungan laba rugi
3. Laporan arus kas
4. Laporan promosi ekonomi anggota
5. Catatan atas laporan keuangan.

D. Karakteristik Penilaian dan Penyajian Laporan Neraca

Neraca dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha yang terjadi pada tanggal tertentu, biasanya pada tanggal terakhir suatu tahun, akhir semester atau laporan akhir bulan. Unsur-unsur penyajian neraca adalah sebagai berikut:

Bagian kiri dari neraca, terdiri dari pos-pos aktiva antara lain:

1. Aktiva lancar
2. Investasi jangka panjang
3. Aktiva tetap
4. Aktiva lain-lain.

Bagian kanan dari neraca, terdiri dari pos-pos antara lain:

1. Kewajiban jangka pendek
2. Kewajiban jangka panjang
3. Ekuitas

A. Aktiva (*Asset*)

Kieso (2002 : 55) mendefinisikan aktiva adalah kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi kejadian yang lalu.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aktiva koperasi dapat dilihat dalam **PSAK No. 27 tahun (2009 : 7-8)** sebagai berikut:

1. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai asset lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut diatas dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Aktiva-aktiva yang dikelola koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

1. Aktiva lancar (*current asset*)

Pada umumnya aturan yang dipakai yang dapat dikelompokkan sebagai harta lancar jika suatu harta dirubah menjadi kas atau digunakan untuk membayar kewajiban lancar didalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih panjang maka harta itu diklasifikasikan sebagai harta lancar.

Aktiva Lancar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Harta tunai /kas/bank
2. Piutang
3. Persediaan (barang dagangan)
4. Lain-lain.

1. Kas /Bank

Menurut **Ely Suhayati (2009 : 143)** pengertian kas dan bank dalam penyajian asset lancar dan kewajiban jangka pendek menyatakan sebagai berikut:

Kas diartikan sebagai alat bayar atau alat tukar dalam transaksi keuangan. Agar uang kas perusahaan aman dari segala macam pencurian, penggelapan, manipulasi maka setiap penerimaan uang segera disetor kebank, sedangkan setiap pengeluaran kas maka digunakan cek atau giro bilyet. Tentunya untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, tidaklah efisien menggunakan cek atau giro bilyet. Oleh karena itu, dibentuklah dana kas kecil yang berfungsi untuk membantu bendahara atau kasir khusus untuk pengeluaran-pengeluaran rutin yang jumlahnya relatif kecil. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan perusahaan.

a. Penilaian Kas /Bank

Penilaian kas dan bank tidak menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena kas dan bank telah menunjukkan nilai yang melekat pada kas dan bank dan aktiva lancar.

b. Penyajian kas/Bank

Untuk keperluan penyajian laporan keuangan kas dan bank disajikan dengan mengacu pada **IAI (2009 : 27)** sebagai berikut:

1. Kas dan bank milik koperasi yang wewenang penggunaannya dibatasi, disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan aktiva jangka panjang tergantung pada jangka waktu pembatasannya.
2. Kas dan bank secara terpisah sebagai aktiva titipan. Kewajiban yang bersangkutan dengan kas dan bank tersebut disajikan sebagai pengurang atas aktiva titipan tadi.

2. Piutang

Piutang menunjukkan tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan, piutang yang timbul bukan dari barang atau jasa yang dihasilkan, dikelompokkan dalam piutang lain-lain.

a. Penilaian piutang

Penilaian piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima.

b. Penyajian piutang

Sesuai dengan lampiran **PSAK No. 27 2009** penyajian piutang harus dipisahkan menjadi piutang usaha, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman non anggota dan piutang lain-lain.

c. Penyisihan piutang tak tertagih

Dalam **IAI (2009 : 9.3)** pengertian piutang tak tertagih sebagai berikut: Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran yang tidak dapat ditagih, jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan tidak dapat ditagih.

Menurut **Kieso (2002 : 390)** mendefinisikan penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

Piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan, yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham.

3. Persediaan

Menurut **Arifin (2001 : 114)** Persediaan pada koperasi dapat diklasifikasikan menjadi persediaan komoditi program dan komoditi non program. Komoditi program adalah komoditi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah seperti penyaluran gula dan pengadaan pangan.

Menurut **IAI (2009 : 27.5)** beberapa karakteristik khusus sehubungan dengan akuntansi persediaan pada koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan pada koperasi dapat digolongkan menjadi persediaan komoditi program dan komoditi umum.
- b. Selain harga beli jumlah kewajiban koperasi sehubungan dengan transaksi untuk mendapatkan komoditi program mencakup berbagai jenis yang ditetapkan oleh pemerintah dan gerakan koperasi itu sendiri.

a. Penilaian Persediaan

Pada dasarnya persediaan dicatat dan dinilai sebesar harga perolehan, tetapi karena pembelian komoditi program harga beli koperasi juga dibebani dengan pembayaran–pembayaran khusus, dimana sebagian diantaranya dapat diterima kembali dikemudian hari.

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang atau penyerahan atau penanaman modal diluar koperasi. Menurut **IAI (2009 : 27)** beberapa karakteristik yang terdapat dalam akun investasi yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan uang yang sifatnya permanen (jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak dapat diperjual belikan).
2. Penyertaan yang jumlahnya selalu bertambah dalam jangka waktu tertentu dan umurnya tergantung pada ketentuan dalam dasar rumah tangga koperasi.

3. Penyertaan yang dapat diambil sewaktu-waktu dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dan tidak dapat diperjual belikan.

a. Penilaian Investasi

Investasi yang mempunyai sifat jangka panjang dicatat dengan metode harga pokok, investasi pada koperasi wewenang pencairannya merupakan investasi yang jatuh tempo belum pasti.

b. Penyajian Investasi

Menurut **PSAK 2009 No. 27 ayat 5** ketentuan mengenai investasi sebagai berikut:

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat nominal setoran.
2. Modal penyertaan ikut menutupi resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh.
3. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu, dan hak-hak pemodal, harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Aktiva Tetap (*fixed asset*)

Aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaian lama yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan memiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar.

a. Penilaian Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aktiva tetap merupakan suatu alokasi harga perolehan aktiva tetap periode-periode akuntansi.

Aktiva tetap dari pemerintah yang dikelola atas dasar revolving fund merupakan bantuan (donasi) pemerintah kepada koperasi dan dicatat sebesar harga perolehan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola aktiva tetap tersebut akan merupakan bagian sisa hasil usaha koperasi dan disisihkan untuk cadangan *revolving*.

Disamping aktiva tetap donasi, pemerintah kala juga memberikan bantuan lunak aktiva tetap pada koperasi yang pembayarannya dilakukan dengan penyesihan dana-dana tertentu yang dikaitkan dengan transaksi pembelian atau penjualan komoditi tertentu. Aktiva tetap ini diakui sebagai milik koperasi dengan merekrut kewajiban.

b. Aktiva Lain-Lain

Pada perkiraan ini dimasukkan semua pos-pos yang tidak dapat dimasukkan pada perkiraannya. Termasuk juga unsur dari aktiva ini adalah aktiva tetap dalam konstruksi dan beban yang ditanggungkan.

B. Kewajiban

Kewajiban pada beban usaha koperasi merupakan kewajiban kepada pihak luar bukan pemilik yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga arus kas keluar dimasa yang akan datang.

Menurut **IAI (2009 : 27.7)** Kewajiban terbagi menjadi dua:

1. Kewajiban jangka pendek terdiri dari : hutang usaha, hutang bank, hutang pajak, hutang simpanan anggota, hutang dana bagian SHU, hutang jangka panjang akan jatuh tempo dan biaya yang harus masih dibayar.
2. Kewajiban jangka panjang terdiri dari : hutang bank dan hutang jangka panjang lainnya.

a. Penyajian kewajiban

Untuk penyajian kewajiban ini pada neraca diatur dalam **PSAK No. 27 tahun 2009** dengan ketentuan sebagai berikut:

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan uang yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.

Kewajiban sukarela harus diakui sebagai hutang jangka pendek karena itu dapat dianggap sebagai kekayaan bersih. Hal ini disebabkan karena anggota dapat mengambil simpanan sukarela.

Kewajiban yang timbul dari sisa hasil usaha seperti dana pembangunan daerah kerja, dana pendidikan, dana sosial, dana untuk pengurus dan karyawan dipandang sebagai kewajiban karena sisa hasil usaha yang merupakan hak koperasi adalah sisa hasil usaha yang disebabkan untuk cadangan.

C. Ekuitas (Kekayaan Bersih)

Modal koperasi merupakan jumlah nilai yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih koperasi antara harta dengan kewajiban. Menurut **Arifin (2002 : 115)** Modal koperasi berasal dari (1) simpanan pokok, (2) simpanan wajib, (3) cadangan koperasi, (4) SHU yang belum dibagi dan (5) donasi.

Menurut **IAI (2009 : 27.4–27.6)** beberapa karakteristik dan penyajian modal koperasi adalah sebagai berikut:

a. Modal Anggota

1. Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang memiliki sama dengan simpanan pokok atau dengan simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
2. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

b. Modal Penyertaan

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran dalam hal modal penyertaan selain uang tunai maka modal penyertaan tersebut diakui sebesar harga pasar yang berlaku umum.
2. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut dengan pemodal dengan pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutupi resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Cadangan

1. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah pokok dan simpanan wajib serta simpanan lain-lain dibebankan sebagai cadangan.

Secara formal, anggota koperasi dapat diakui jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pada saat pertama menjadi anggota,

disamping ia juga harus menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib.

Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali jika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi akan tetap menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen.

Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lainnya.

Simpanan pokok dan simpanan wajib dineraca adalah menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka disajikan contoh neraca yang disusun berpedoman kepada PSAK No. 27 tahun 2009 yang dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Tabel II.1

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
31 Desember 20X1 dan 20X0

AKTIVA	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	xxxx	xxxx	Hutang Usaha	Rp xxxx	Rp xxxx
Investasi Jangka Pendek	xxxx	xxxx	Hutang Bank	xxxx	xxxx
Piutang Usaha	xxxx	xxxx	Hutang Pajak	xxxx	xxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxx	xxxx	Hutang Simpanan Anggota	xxxx	xxxx
Piutang Pinjaman Non-Anggota	xxxx	xxxx	Hutang Dana Bagian SHU	xxxx	xxxx
Piutang Lain-lain	xxxx	xxxx	Hutang Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Peny. Piutang Tak Tertagih	(xxxx)	(xxxx)	Akan Jatuh Tempo	xxxx	xxxx
Persediaan	xxxx	xxxx	Biaya Harus Dibayar	xxxx	xxxx
Pendapatan Akan Diterima	xxxx	xxxx	Jumlah Kewajiban		
Jumlah Aktiva Lancar	RP xxxx	Rp xxxx	Jangka Pendek	Rp xxxx	Rp xxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan Pada Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx	Hutang Bank	Rpxxxx	Rp xxxx
Penyertaan Pada Non-Koperasi	xxxx	xxxx	H. Jangka Panjang Lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp xxxx	Rp xxxx	Jumlah Kewajiban		
			Jangka Panjang	Rp xxxx	Rp xxxx
AKTIVA TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak Atas Tanah	Rp xxxx	Rp xxxx	Simpanan Wajib	Rp xxxx	Rp xxxx
Bangunan	xxxx	xxxx	Simpanan Pokok	xxxx	xxxx
Mesin	xxxx	xxxx	Modal Penyertaan	xxxx	xxxx
Inventaris	xxxx	xxxx	Partisipasi Anggota	xxxx	xxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxx)	(xxxx)	Modal Penyertaan	xxxx	xxxx
Jumlah Aktiva Tetap	RP xxxx	Rp xxxx	Modal Sumbangan	xxxx	xxxx
xxxx			Dana Cadangan	xxxx	
AKTIVA LAIN-LAIN			SHU Belum Dibagi	xxxx	xxxx
Ak. Tetap Dalam Kontruksi	Rp xxxx	Rp xxxx	Jumlah Ekuitas	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Ditangguhkan	xxxx	xxxx			
Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp xxxx	Rp xxxx			

JUMLAH AKTIVA	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
	<u>Rp xxxx Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx Rp xxxx</u>

Sumber: PSAK No. 27

E. Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi

Perhitungan hasil usaha merupakan pengganti laporan rugi laba yang dianjurkan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata hanya diukur dari laba tetapi lebih ditekankan pada manfaat untuk anggota, oleh karena itu koperasi tidak menggunakan istilah laba rugi melainkan sisa hasil usaha.

Ketentuan mengenai penyajian ini diatur **SAK No. 27 tahun 2009** sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal jenis dan jumlah pembagiannya sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban.
3. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Perhitungan hasil usaha harus memuat usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dan non anggota.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam satu tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan

rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha tersebut diantaranya untuk anggota, dana pendidikan, sosial dan dana koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi disebut sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan. Dan jumlah yang dialokasikan untuk selain koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan masih menunggu rapat anggota. Maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perhitungan sisa hasil usaha menurut pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut **IAI (2009 : 27.11)** pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai pendapatan partisipasi bruto.
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam perhitungan sisa hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antar pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai bagian laba rugi dengan non anggota.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Perhitungan sisa hasil usaha memuat perhitungan tersendiri antara pendapatan yang berasal dari anggota dan non anggota. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan besarnya menjadi anggota koperasi.
- b. Menentukan tingkat keterkaitan usaha koperasi dengan usaha keropasinya.
- c. Untuk menentukan besarnya sisa hasil usaha dari anggota dan bukan anggota guna penerapan pajak penghasilan dan pembagian sisa hasil usaha.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan perhitungan hasil usaha yang disusun berpedoman kepada PSAK No. 27 tahun 2009 seperti Tabel II.2 dibawah ini:

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp XXXX	Rp XXXX
Beban Pokok	(XXXX)	(XXXX)
Partisipasi Neto Anggota	Rp XXXX	Rp XXXX
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp XXXX	Rp XXXX
Harga Pokok	(XXXX)	(XXXX)
Laba (Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	Rp XXXX	Rp XXXX
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp XXXX	Rp XXXX
BEBAN OPERASI:		
Beban Usaha	Rp XXXX	Rp XXXX
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp XXXX	Rp XXXX
Beban Perkoperasiaan	Rp XXXX	Rp XXXX
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasiaan	Rp XXXX	Rp XXXX
Pendapatan Dan Beban Lain-lain	XXXX	XXXX
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp XXXX	Rp XXXX
Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	XXXX	XXXX
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp XXXX	Rp XXXX

Pajak Penghasilan
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak

(XXXX)	(XXXX)
Rp XXXX	Rp XXXX

Sumber: PSAK No. 27

F. Penyajian Laporan Arus Kas Koperasi

Menurut **Sofyan Harahap (2002 : 92)** Laporan Arus kas merupakan akomodasi dari serangan yang bertubi-tubi pada kelemahan laporan Nerca dan Laporan Laba / Rugi.

Laporan arus kas menyediakan informasi laporan tentang arus kas suatu badan usaha berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Laporan arus kas menyediakan informasi perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Laporan arus kas akan membantu pemakai untuk:

1. Menilai kemampuan koperasi untuk memasukkan kas dimasa yang akan datang.
2. Menilai alasan-alasan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Menilai pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan selama satu periode tertentu.

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas koperasi aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk

melunasi pinjaman pemeliharaan kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan operasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Menurut PSAK No. 27 laporan arus kas pada tabel II.3 dan tabel II.4 dibawah ini:

Tabel II. 3

**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN ARUS KAS (Metode Langsung)
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20x1**

Dalam Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	xxxxxx	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(xxxxxx)</u>	
Kas yang dihasilkan operasi	xxxxxx	
Pembayaran bunga	(xxxxxx)	
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(xxxxxx)</u>	
Arus kas sebelum pos luar biasa	xxxxxx	
Hasil dari asuransi karena gempa bumi	<u>xxxxxx</u>	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		xxxxxx
Arus kas dari aktivitas operasi	(xxxxxx)	
Perolehan anak perusahaan x dengan kas	(xxxxxx)	
Hasil penjualan peralatan	xxxxxx	
Penerimaan bunga	xxxxxx	
Penerimaan deviden	<u>xxxxxx</u>	
Arus kas yang digunakan untuk investasi		xxxxxx
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxxxx	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxxxx	
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxxxx)	
Pembayaran deviden *	<u>(xxxxxx)</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>xxxxxx</u>
Kenaikan bersih kas dan setara kas		xxxxxx
Kas dan setara kas awal periode		xxxxxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		xxxxxx

*Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

Sumber: PSAK No. 27

Tabel II.4

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN ARUS KAS (Metode Tidak Langsung)
Periode Yang Berakhir 31 Desember 20x1

Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	XXXXX	
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	XXXXX	
Kerugian	XXXXX	
Penghasilan investasi	(XXXXX)	
Beban bunga	<u>XXXXX</u>	
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	XXXXX	
Kenaikan piutang dagang dan piutang lain	(XXXXX)	
Penurunan persediaan	XXXXX	
Penurunan hutang dagang	<u>(XXXXX)</u>	
Kas dihasilkan dari operasi		
Pembayaran bunga	XXXXX	
Pembayaran pajak penghasilan	(XXXXX)	
Arus kas sebelum pos luar biasa	(XXXXX)	
Hasil dari penyesuaian asuransi gempa bumi	XXXXX	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		<u>XXXXX</u>
Arus kas dari aktivitas investasi		
Perolehan perusahaan x dengan kas	(XXXXX)	
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(XXXXX)	
Hasil penjualan peralatan	XXXXX	
Penerimaan bunga	XXXXX	
Penerimaan deviden	<u>XXXXX</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		
Arus kas dari aktivitas pendanaan		XXXXX
Hasil dari penerbitan modal saham	XXXXX	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	XXXXX	
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(XXXXX)	
Pembayaran deviden*	<u>(XXXXX)</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		
Kenaikan bersih kas dan setara kas		<u>XXXXX</u>
Kas dan setara kas awal periode		XXXXX
Kas dan setara kas akhir periode		<u>XXXXX</u>

*Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

Sumber: PSAK No. 27

G. Penyajian Laporan Promosi Anggota Koperasi

Karakteristik pelaporan promosi ekonomi anggota menurut **IAI (PSAK No. 27, 2009 : 27.9-27.10)** adalah sebagai berikut:

1. Dalam sisa hasil usaha tahun berjalan yang belum dibagi, maka manfaat ekonomi anggota yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.
2. Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi anggota yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 - b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
 - c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 - d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
3. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari pelayanan yang dilakukan untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dan pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

4. Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Contoh laporan promosi anggota sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel II.5 berikut ini:

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Konsumen)

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X0
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar		(xxxx)
(xxxx)		
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi		
Pemasaran Produk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxx	Rp xxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi		(xxxx)
(xxxx)		
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi		
Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM		
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
- Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota		(xxxx)
(xxxx)		
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan		
Jasa Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama		
Tahun Berjalan	Rp xxxx	Rp xxxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		

Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan
 Untuk Anggota
 Jumlah Promosi Ekonomi Anggota

Rp	xxxx	Rp	xxxx
Rp	xxxx	Rp	xxxx

Sumber: PSAK No. 27

H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan digunakan dalam memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Dalam **PSAK No. 27 (2009: 27.10)** catatan atas laporan keuangan pada koperasi menyajikan pengungkapan yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
 - a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - b. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi antara lain mengenai :
 - a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran rumah tangga maupun dalam praktek atau telah dicapai oleh koperasi.
 - b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan usaha baru untuk anggota.

- c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
- d. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- e. Pembatasan penggunaan dan risiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f. Aset yang dioperasikan oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi.
- g. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- j. Penyelenggaraan rapat anggota, serta keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Juga mengenai kebijakan koperasi atas dasar metode-metode yang digunakan perolehan aset, pembagian sisa hasil usaha dan lain sebagainya.

I. Koperasi Dalam Pandangan Islam

Koperasi disebut juga dengan syirkah Ta'awuniyah (perseroan tolong menolong), terlepas apakah koperasi sudah dibahas atau disinggung-singgung oleh para ulama yang membahas tentang syirkah maupun tidak. Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka

koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.

Didalam hadits yang diriwayatkan oleh **Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW** bersabda, yang berbunyi:

وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. لِمَا فَلَيْتَهُ. فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ.
فَلْيَنْصُرْهُ.

Artinya: “ *Hendaklah seseorang itu menolong saudaranya baik yang zalim maupun yang dizalimi. Terhadap yang zalim, hendaklah dia cegah kezalimannya. Sesungguhnya itu telah menolongnya. Dan terhadap yang dizalimi hendaklah dia membelanya.*”

Hadits ini menganjurkan ummat islam untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin, dengan cara memainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan dengan cara lain-lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, dan mandiri yang berakar dalam masyarakat serta mampu memajukan ekonomi anggotanya. KJKS Mambaul Hidayah berbeda dengan badan usaha lainnya, jika badan usaha lain memiliki misi dan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya demi kelangsungan operasional koperasi sedangkan KJKS Mambaul Hidayah memiliki misi dan tujuan sosial yaitu Menjadi pusat kegiatan islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir dan batin serta sejahtera dunia akhirat, memacu pembinaan ummat dalam bidang pengembangan usaha muamalat islam.

Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah (KJKS Mambaul Hidayah) berdiri atas inisiatif atau gagasan Badan Operasi Bersama (BOB pedada) dikecamatan Sabak Auh. Dimana pendiriannya melalui proses yang panjang dan rapat selama tiga kali pada bulan Oktober, November dan Desember 2006. Pada akhir bulan Desember 2006 dengan usul K.H Sahil diberi nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS Mambaul Hidayah). Pada tanggal 25 Januari tahun 2007 dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 01/BH/IV.8/1/2007. Dan resmi berdirinya koperasi ini dengan nama Koperasi

Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah (KJKS Mambaul Hidayah). Yang diresmikan di Madarasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'in Bandar Sungai oleh Bapak Bupati Siak H. Arwin AS, SH dan dihadiri oleh Camat Sabak Auh serta semua perangkat Desa di Kec. Sabak Auh.

Modal awal dari koperasi ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta pemberian dana dari Bank Riau dan juga Pemda. Awalnya anggota koperasi berjumlah 25 orang dimana setiap anggota membayar Rp. 50.000,- sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- setiap bulannya. Sedangkan untuk simpanan sukarela tidak terbatas berapapun jumlahnya. Pemberian dana dari Bank Riau sebesar Rp. 1,5 miliar dicatat sebagai hutang koperasi. Sedangkan dana dari pemda sebesar Rp. 1 miliar dicatat sebagai dana sumbangan.

Setelah 4 tahun berdiri KJKS Mambaul Hidayah memiliki anggota 300 orang. KJKS Mambaul Hidayah mampu memberikan kebanggaan kepada para anggota KJKS Mambaul Hidayah dan masyarakat umum. Dengan meningkatnya dana yang dihimpun dan juga meningkatnya penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada anggota Koperasi yang terdiri dari anggota Unit Simpan Pinjam dan anggota Unit Waserda dan juga masyarakat umum.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian

tugas dari atau untuk setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan **UU No. 25 tahun 1992** tentang pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri :

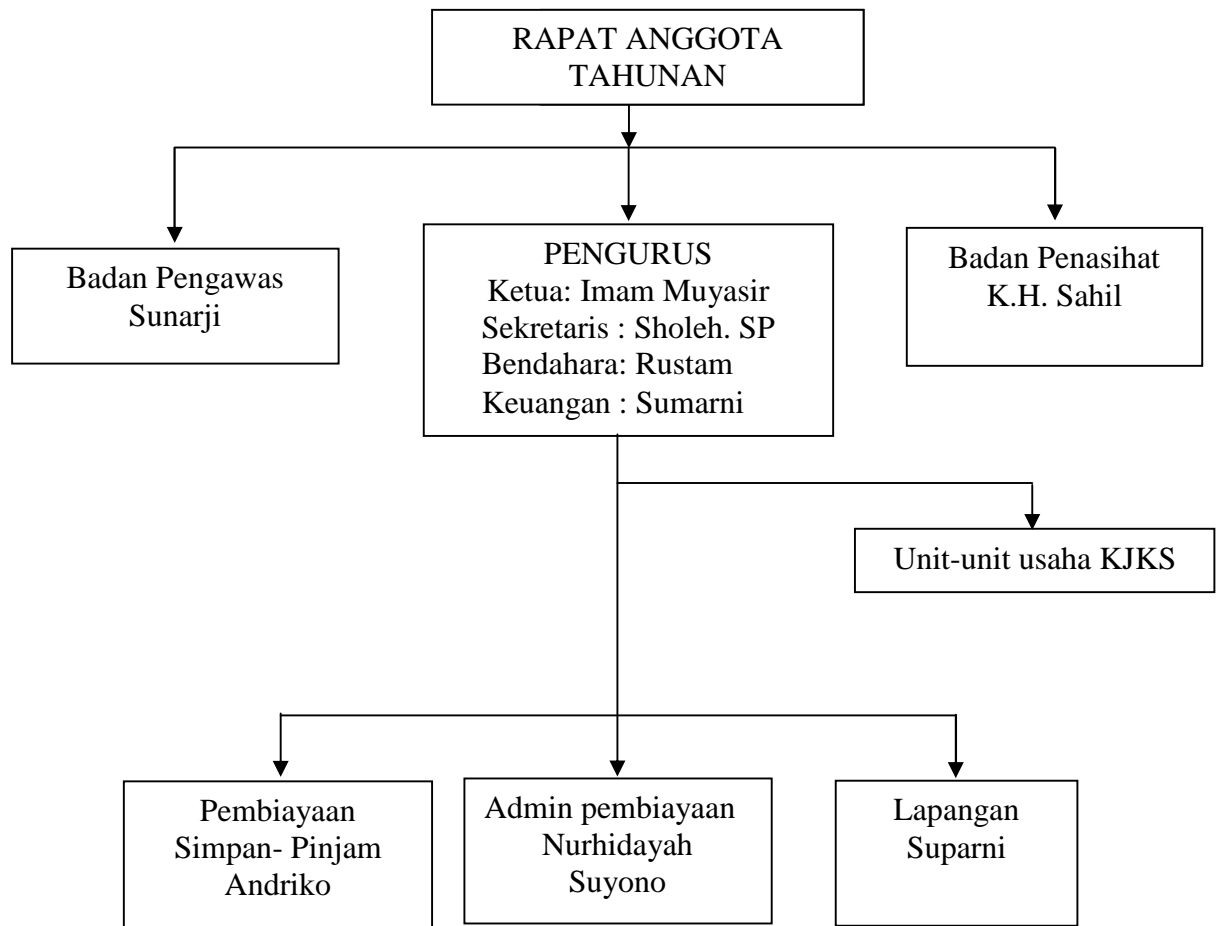
- (1) Rapat anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota.
- (3) Badan penasehat dan pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha koperasi, pengurus dapat mempekerjakan karyawan untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah telah membentuk dan mempunyai kelengkapan struktur organisasi sesuai dengan UU No. Tahun 1992 tentang perkoperasian. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas berikut penulis sajikan tentang struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar III.1 dibawah ini:

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGURUS PENGAWAS DAN PENGELOLA KOPERASI JASA

KEUANGAN SYARIA'AH MAMBAUL HIDAYAH TAHUN 2010



Sumber: Koperasi KJKS Mambaul Hidayah

Tugas dan wewenang koperasi berdasarkan struktur yang ada adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk

pelaksanaan kegiatan operasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar, dalam anggota ditentukan kebijakan tugas-tugasnya dalam organisasi tersebut.

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan melaksanakan kebijaksanaan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat anggota.

Pengurus bertanggung mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha kepada rapat anggota. Ketua KJKS Mambaul Hidayah memiliki bawahan yang terdiri dari, sekretaris, bendahara dan keuangan.

a. Ketua, memiliki tugas:

1. Menyusun program kerja bersama pengurus lainnya.
2. Membuat rencana rapat kerja dan rencana anggaran belanja.
3. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya.

b. Sekretaris, memiliki tugas:

1. Mengelola simpan pinjam anggota.
2. Menyalurkan dana bagi peminjam.
3. Melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang terutama rencana pengembangannya.

c. Keuangan, memiliki tugas:

1. Membuat laporan harian kas.
2. Membuat penerimaan dan pengeluaran kas.

3. Melakukan pemberdayaan kepada pihak ketiga.

3. Pengawas

Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggota dan bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Badan pengawas mempunyai tugas:

- a. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
- b. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya penyelewengan.
- d. Keberesan administrasi secara menyeluruh.

C. Aktivitas Usaha KJKS “MAMBAUL HIDAYAH”

Melaksanakan aktivitas operasi merupakan dasar didirikannya koperasi. Tujuan dari aktivitas koperasi tersebut adalah memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan mensejahterakan anggotanya. Dalam hal ini bidang usaha yang dipilih haruslah benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi koperasi untuk melanjutkan usahanya.

Aktivitas utama KJKS Mambaul Hidayah adalah unit pembiayaan, unit waserda dan simpan pinjam.

a. Pembiayaan

Unit pembiayaan ini diperuntukkan bagi petani yang ada di sekitar Sabak Auh, yang dapat digunakan untuk memperluas lahan kebun kelapa sawit di Sabak Auh khususnya dan di Siak umumnya. Disamping untuk perluasan kebun kelapa sawit diperuntukkan juga dalam perawatan kebun sawit tersebut.

b. Unit waserda (warung serba ada)

Dalam hal ini KJKS Mambaul Hidayah menyediakan berbagai macam pupuk bagi anggota masyarakat sekitarnya. KJKS Mambaul Hidayah juga menerima penjualan kelapa sawit (TBS) bagi anggota dan masyarakat disekitarnya.

c. Simpan pinjam

Unit usaha ini disamping diperuntukkan bagi anggota dan masyarakat umum. Karena tujuan dari KJKS Mambaul Hidayah itu sendiri adalah memacu pembinaan ummat dalam bidang pengembangan usaha.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari uraian teoritis yang telah disajikan pada bab sebelumnya serta tinjauan penerapan standar akuntansi keuangan, pada bab ini penulis memberikan analisis dan penilaian terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2009 pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah dikecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Adapun penjelasan dibawah ini merupakan analisa yang dilakukan terhadap masing-masing unsur pada laporan Keuangan KJKS Mambaul Hidayah.

A. Metode Pencatatan

Dilihat dari sistem pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan diketahui bahwa KJKS Mambaul Hidayah menerapkan sistem akuntansi berdasarkan azas akrual. Penerapan akuntansi akrual dapat dibuktikan dari pengakuan pendapatan dan beban dan dengan pengurangan aktiva dan kewajiban serta perubahan-perubahan pada saat terjadinya transaksi. Alasan pemakaian metode pencatatan akrual adalah kepraktisan dan mudah dipahami.

B. Penilaian dan Penyajian Neraca

Neraca KJKS Mambaul Hidayah disajikan secara komparatif atau berkala antara tahun buku yang sedang berjalan dan tahun buku tahun sebelumnya atau antara tahun buku 2009 dan 2010, disusun dalam bentuk stafel yang mempunyai dua bagian yaitu dimana pada bagian bagian atas menyajikan semua pos aset dan pada bagian bawah menyajikan semua pos kewajiban dan pos ekuitas. Penyajian

secara komparatif dapat memudahkan pengguna laporan keuangan untuk melihat perkembangan KJKS Mambaul Hidayah. Penyajian ini belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Karena didalam Standar Akuntansi Keuangan penyajian neraca disajikan dalam bentuk skontro yang terdiri dari dua sisi yaitu sisi kiri atau debit yang di isi akun aktiva dan sebelah kanan atau sisi kredit yang berisi akun kewajiban/hutang dan modal.

Penyajian secara komparatif dapat memudahkan pengguna laporan keuangan untuk melihat perkembangan dan kemunduran KJKS Mambaul Hidayah.

Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh KJKS Mambaul Hidayah masih terdapat beberapa kesalahan yang akan peneliti uraikan dengan membandingkan antara laporan keuangan yang telah disajikan dengan PSAK No. 27 Tahun 2009. Adapun ketidak sesuaiannya akan peneliti uraikan dibawah ini:

1. Kas dan Bank

Pada aktiva lancar neraca pencatatan, penilaian dan penyajiannya berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya. Kas adalah aktiva lancar yang paling likuid yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan umum koperasi. Sedangkan bank merupakan sisa rekening giro yang juga dapat digunakan dalam membiayai kegiatan umum. Jadi, kas dan bank pada koperasi memiliki fungsi yang sama yaitu sama-sama membiayai kegiatan umum koperasi.

Didalam neraca gabungan pada laporan keuangan yang disajikan oleh KJKS Mambaul Hidayah, terdapat pemisahan antara akun kas dan bank, nilai akun kas sebesar Rp. 17.031.171,- dan nilai akun bank sebesar Rp.421.951.862,-. Dampak yang ditimbulkan dari pemisahan antara kas dan bank memang tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai aset hanya saja disajikan tidak sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 yang digunakan sebagai panduan Koperasi.

Menurut PSAK No. 27 tahun 2009 bahwa akun kas dan bank seharusnya digabung, yang awalnya nilai kas sebesar Rp. 17.031.171,- dan nilai bank sebesar Rp. 421.951.862,- kemudian digabung seperti yang terdapat didalam format neraca yang disajikan dalam PSAK No. 27 tahun 2009. Sehingga nilai yang seharusnya disajikan adalah sebesar Rp. 438.983.033,- untuk akun kas dan bank dalam laporan keuangan KJKS Mambaul Hidayah.

Adapun jurnal koreksi yang dibuat oleh peneliti untuk kas dan bank adalah sebagai berikut:

Kas dan Bank	Rp. 438.983.033,-
Kas	Rp. 17.031.171,-
Bank	Rp. 421.951.862,-.

2. Piutang

Piutang merupakan hak atau tagihan koperasi kepada anggota maupun non anggota koperasi yang timbul karena transaksi penjualan suatu barang secara kredit ataupun peminjaman uang.

Didalam penjelasan pos-pos dalam neraca yang dilaporkan untuk unit usaha waserda, adanya penyajian nilai akun piutang anggota sebesar Rp. 140.111.200,- dan penyajian nilai akun piutang anggota koperasi sebesar Rp. 501.000.000,- kemudian untuk unit usaha simpan pinjam, adanya penyajian nilai akun piutang anggota sebesar Rp. 200.500.725,- koperasi hanya mencatat piutang anggota sebesar Rp. 841.611.925,-. Sedangkan untuk piutang non anggota sendiri koperasi mencatat untuk unit pupuk, adanya penyajian nilai akun piutang pupuk sebesar Rp. 71.000.400,- dan penyajian nilai akun piutang USP sebesar Rp. 40.038.000,- kemudian untuk unit usaha Waserda, adanya penyajian nilai akun piutang Non anggota sebesar Rp. 100.000.043,- tetapi koperasi mencatat piutang non anggota sebesar Rp. 121.038.443,-.

Adapun jurnal yang telah dibuat oleh KJKS Mambaul Hidayah untuk penyajian piutang Anggota dan non anggota tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Piutang Anggota	Rp. 841.611.925,-
Piutang Non Anggota	Rp. 121.038.443,-
Pendapatan/penjualan kredit	Rp. 962.650.368,-.

Sementara menurut PSAK No. 27 Tahun 2009, seharusnya penyajian akun piutang terbagi menjadi empat bagian yaitu piutang usaha, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman non-anggota, dan piutang lain-lain, penyajian tersebut sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009. Dampak dari kesalahan penyajian akun piutang ini menyebabkan tidak dapat diketahuinya nilai dari masing-masing piutang, sehingga jumlah piutang anggota terlalu besar dan menimbulkan kebingungan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Sehingga penyajian akun piutang pada KJKS Mambaul Hidayah yang seharusnya dipisahkan antara piutang usaha, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman non-anggota, dan piutang lain-lain. Penyajian dari masing-masing akun tersebut dapat dinilai dan diuraikan berdasarkan bukti pencatatan daftar piutang yang ada yaitu berupa daftar piutang anggota, daftar piutang non-anggota, daftar piutang waserda dan daftar piutang pupuk.

Dari beberapa daftar piutang yang disajikan pada KJKS Mambaul Hidayah tersebut dapat disajikan piutang baru, yaitu piutang usaha yang akan mengurangi dari piutang anggota dan non anggota dengan rincian sebagai berikut:

Piutang usaha, merupakan piutang yang timbul dari transaksi berhubungan dengan kegiatan usaha dalam koperasi. Pada KJKS Mambaul Hidayah piutang usaha secara keseluruhan terdapat pada unit usaha waserda, terbagi menjadi:

- a. Piutang pupuk Rp. 71.000.400,-
- b. Piutang Waserda Rp. 150.111.243,-

Jadi, total piutang usaha Rp. 221.111.643,- .

Adapun jurnal koreksi yang seharusnya dibuat oleh KJKS Mambaul Hidayah untuk piutang usaha adalah sebagai berikut:

Piutang usaha	Rp. 221.111.643,-
Piutang Anggota	Rp. 140.111.200,-
Piutang Non Anggota	Rp. 81.000.443,-.

Dengan adanya piutang usaha ini maka piutang anggota menjadi sebesar Rp. 701.500.725,- (Rp. 841.611.925,- - Rp. 140.111.200,-) dan piutang non anggota sebesar Rp. 40.038.000,- (Rp. 121.038.443,- - Rp. 81.000.443,-).

Koperasi KJKS Mambaul Hidayah tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih karena sesuai hasil wawancara peneliti dengan pengurus koperasi, semua piutang dapat ditagih. Karena cara pembayarannya dari setoran sawit yang dijual kepada koperasi.

3. Tanah dan Bangunan

Tanah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dengan cara membeli kepada pengurus koperasi. Diatas tanah ini didirikan bangunan yang akan digunakan untuk kantor koperasi sendiri. Tanah dan bangunan ini merupakan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

Didalam neraca gabungan pada laporan keuangan yang disajikan oleh KJKS Mambaul Hidayah, dalam pencatatan aktiva tetap tidak memisahkan antara nilai tanah dan bangunan Rp. 100.000.000,- dampak yang ditimbulkan dari penggabungan antara tanah dan bangunan mengakibatkan para pembaca laporan keuangan tidak mengetahui berapa nilai tanah dan bangunan. Sedangkan bagi koperasi sendiri mengakibatkan susahnya untuk melakukan penyusutan terhadap bangunan tersebut. Karena tidak bisa mengetahui berapa besarnya nilai bangunan yang akan disusutkan. Pada akhirnya koperasi tidak menyajikan Neraca yang sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 yang digunakan sebagai panduan Koperasi.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketua koperasi ternyata nilai tanah sebesar Rp. 39.957.000,- dan nilai bangunan sebesar Rp. 60.043.000,- untuk akun tanah ini diambil dari awal mula pembelian tanah. Sedangkan untuk bangunan dinilai dari semua biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut sampai bangunan ini siap dipakai pada awal bulan Januari 2010.

Menurut PSAK No. 27 tahun 2009 bahwa akun tanah dan akun bangunan disajikan secara terpisah. Pada awalnya akun total tanah dan bangunan Rp.100.000.000,- kemudian dipisah seperti yang terdapat didalam format neraca yang disajikan dalam PSAK No. 27 tahun 2009. Dari hasil wawancara peneliti ternyata nilai tanah sebesar Rp. 39.957.000,- dan nilai bangunan sebesar Rp. 60.043.000,- untuk akun tanah dan bangunan dalam laporan Keuangan KJKS Mambaul Hidayah.

Adapun jurnal koreksi yang seharusnya dibuat oleh KJKS Mambaul Hidayah untuk penyajian tanah dan bangunan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Untuk akun tanah dicatat sebagai berikut:

Tanah Rp. 39.957.000,-

Tanah dan Bangunan Rp. 39.957.000,-

Sedangkan untuk akun bangunan dicatat sebagai berikut:

Bangunan Rp. 60.043.000,-

Tanah dan Bangunan Rp. 60.043.000,-.

Dengan adanya pemisahan antara akun tanah dan bangunan ini maka akan memudahkan koperasi untuk melakukan penyusutan terhadap nilai bangunan.

3. Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Penyusutan aktiva tetap merupakan pengalokasian harga perolehan aktiva tetap kepada kelompok akun beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut. Aktiva tetap akan kehilangan kemampuan atau daya guna seiring berlalunya waktu dalam memberikan manfaat kepada suatu perusahaan/koperasi.

Dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap pada penyajian Neraca, Koperasi KJKS Mambaul Hidayah tidak melakukan metode penyusutan yang telah ditetapkan sesuai Standar Akuntansi, hal ini dapat dilihat pada bukti pencatatan daftar harta tetap yang didalamnya dijelaskan besarnya persentase penyusutan, jumlah barang, harga perolehan, tahun perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku.

Sedangkan yang seharusnya KJKS Mambaul Hidayah menggunakan salah satu metode penyusutan pada aktiva tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2009 tentang metode penyusutan aktiva tetap yang telah ditetapkan, seperti menggunakan salah satu metode penyusutan yang telah ditetapkan tersebut diantaranya metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*), sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh koperasi tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari tidak digunakannya salah satu metode penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi menyebabkan tidak dilakukannya penyusutan aktiva tetap sehingga nilai aktiva tetap terlalu tinggi

pada saat pemakain sudah 1 tahun sampai habis manfaat aktiva tetap dan juga menyebabkan sisa hasil usahanya menjadi terlalu tinggi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus koperasi, diperoleh beberapa informasi bahwa umur manfaat aktiva tetap untuk bangunan, peralatan dan kendaraan adalah dua puluh tahun, delapan tahun dan lima tahun. Sementara pada daftar lampiran aktiva tetap disebutkan harga perolehan dan tahun perolehan masing-masing aktiva tetap KJKS Mambaul Hidayah yang dibutuhkan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap.

Perhitungan penyusutan aktiva tetap per 31 Desember 2010 pada KJKS Mambaul Hidayah berdasarkan daftar lampiran ativa tetap oleh koperasi dan hasil wawancara, dapat dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), sehingga dapat disajikan nilai penyusutan bangunan, peralatan usaha, peralatan kantor dan kendaraan/mobil melalui perhitungan sebagai berikut:

1. Penyusutan bangunan

Tahun perolehan 2010 = 5 % x Rp. 60.043.000,- = Rp. 3.002.150,-

Jadi, penyusutan bangunan **Rp. 3.002.150,- .**

2. Penyusutan peralatan kantor

a) Tahun perolehan 2009 = $12,5 \% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 3.125.000,-$

b) Tahun perolehan 2009 = $12,5 \% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 3.125.000,-$

Jadi, penyusutan peralatan kantor Rp. 6.250.000,-

3. Penyusutan peralatan usaha

a) Tahun perolehan 2009 = $12,5 \% \times \text{Rp. } 773.000,- = \text{Rp. } 96.625,-$

b) Tahun perolehan 2010 = 12,5 % x Rp. 676.375,- = Rp. 96.625,-.

Jadi, penyusutan peralatan usaha Rp. 193.250,- .

4. Penyusutan kendaraan/mobil

a) Tahun perolehan 2010 = 20 % x Rp. 200.000.000,- = Rp. 40.000.000,-

Jadi, penyusutan kendaraan/mobil Rp. 40.000.000,-.

Penyusutan inventaris/kendaraan/mobil disusutkan hanya ditahun 2010, karena perolehan kendaraan/mobil dibulan Desember 2009. Jadi, penyusutannya hanya ditahun 2010.

Pada penyajian daftar aktiva tetap oleh KJKS Mambaul Hidayah dilakukan pencatatan dan penyajian keseluruhan aktiva tetap yaitu dari tahun 2009 sampai 2010.

Adapun jurnal yang dibuat oleh peneliti terhadap penyusutan bangunan, peralatan kantor, peralatan usaha dan kendaraan tahun 2010 untuk tahun perolehan 2009 hingga 2010 adalah sebagai berikut:

Akibat tidak disusutkannya peralatan usaha di Tahun 2009 koperasi harus membuat jurnal koreksi:

a. SHU Tahun 2010	Rp. 3.125.000,-
Akumulasi penyusutan Peralatan Kantor	Rp. 3.125.000,-
b. SHU Tahun 2010	Rp. 96.625,- .
Akumulasi penyusutan peralatan usaha	Rp. 96.625,-.

Untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:

c. Beban penyusutan bangunan	Rp. 3.002.150,-
Akumulasi penyusutan bangunan	Rp. 3.002.150,-

d.	Beban penyusutan peralatan kantor	Rp. 3.125.000,-
	Akumulasi penyusutan peralatan kantor	Rp. 3.125.000,-.
e.	SHU Tahun 2010	Rp. 96.625,- .
	Akumulasi penyusutan peralatan usaha	Rp. 96.625,-
f.	Beban penyusutan kendaraan/mobil	Rp. 40.000.000,-
	Akumulasi penyusutan kendaraan/mobil	Rp. 40.000.000,-

Dengan adanya jurnal tersebut diatas, maka akan berpengaruh terhadap Neraca dan Laporn Sisa Hasil Usaha. Beban penyusutan bangunan, peralatan usaha, peralatan koperasi dan kendaraan / mobil berpengaruh terhadap SHU sehingga mengakibatkan SHU menjadi berkurang dari yang disajikan menjadi Rp. 442.800.600,- (492.246.000,- – 49.445.400,-).

Adapun dengan adanya akumulasi penyusutan aktiva tetap ini dibuat jurnal koreksi untuk SHU Tahun berjalan sebagai berikut:

SHU Tahun berjalan	Rp. 49.445.400,-
Akumulasi penyusutan aktiva tetap	Rp. 49.445.400,-.

Sedangkan dengan adanya penyusutan aktiva tetap akan berpengaruh terhadap Neraca sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai Aktiva tetap.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas peneliti menyajikan neraca yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 Tahun 2009, tahun buku 2010 yang dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini:

Tabel IV.1

KOPERASI KJKS MAMBAUL HIDAYAH SIAK
NERACA SETELAH KOREKSI
31 Desember 2010 dan 2009

ASET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		2010	2009			2010	2009
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas dan Bank	Rp	438.983.033	400.296.580	Hutang Usaha	Rp	791.433.039	90.000.000
Investasi Jangka Pendek		-	-	Hutang Bank		-	-
Piutang Usaha		221.111.643	-	Hutang Pajak		-	-
Piutang Pinjaman Anggota		701.500.725	669.548.500	Hutang Simpanan Anggota		145.020.000	137.000.000
Piutang Pinjaman Non Anggota		40.038.000	50.640.000	Hutang SHU bagian anggota		-	-
Piutang Lain-Lain		-	-	Hutang dana-dana SHU		-	-
Peny. Piutang Tak Tertagih		-	-	Hutang Jangka Panjang			
Persediaan		595.048.138	310.891.920	akan Jatuh Tempo		-	-
Pendapatan Akan Diterima		54.624.950	-	Biaya YMH Dibayar		1.960.000	3.460.000
Jumlah Aset Lancar	Rp	<u>2.051.306.489</u>	<u>1.431.377.000</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp	<u>938.413.039</u>	<u>230.460.000</u>
INVESTASI JANGKA PANJANG				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Penyertaan pada Koperasi	Rp	-	-	Hutang USP	Rp	245.345.500	319.500.000
Penyertaan pada Non Koperasi		-	-	Hutang Jangka Panjang Lainnya		620.075.361	660.540.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	-	-	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp	<u>865.420.861</u>	<u>980.040.000</u>
ASET TETAP				EKUITAS			
Tanah/Hak atas Tanah	Rp	39.957.000	39.957.000	Simpanan Wajib	Rp	36.000.000	33.500.000
Bangunan		60.043.000	-	Simpanan Pokok		15.000.000	15.000.000
Peralatan Kantor		25.000.000	25.000.000	Modal Penyertaan			
Peralatan Usaha		773.000	773.000	Partisipasi Anggota		-	-
Inventaris		200.000.000	200.000.000	Modal Penyertaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		(49.445.400)	-	Modal Sumbangan		-	-
Jumlah Aset Tetap	Rp	<u>276.327.600</u>	<u>265.491.500</u>	Cadangan		30.000.000	25.900.000
ASET LAIN-LAIN				SHU Belum Dibagi		442.800.600	411.730.000
Ak.Tetap dalam Konstruksi	Rp	-	-	Jumlah Ekuitas	Rp	<u>523.800.600</u>	<u>486.130.000</u>
Beban Ditangguhkan		-	-				
Jumlah Aset Lain-Lain	Rp	-	-				
JUMLAH ASET				JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
	Rp	<u>2.327.634.500</u>	<u>1.696.630.000</u>		Rp	<u>2.327.634.500</u>	<u>1.696.630.000</u>

Sumber : Data Olahan, 2012

C. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam periode tertentu. Unsur yang mempengaruhi hasil usaha adalah pendapatan dan beban, sedangkan dalam penyajian PHU pada koperasi terdiri dari partisipasi anggota, pendapatan non-anggota dan beban operasi yang disajikan sesuai PSAK No. 27 Tahun 2009.

Sehingga dapat diuraikan bahwa unsur yang mempengaruhi hasil usaha dalam penyajian PHU pada koperasi yang sesuai dengan PSAK No.27 tahun 2009 adalah:

Didalam laporan keuangan KJKS Mambaul Hidayah, ditemukan ketidaksesuaian dalam pembuatan format laporan keuangan terutama pada penyajian laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha. KJKS Mambaul Hidayah tidak menyajikan akun partisipasi anggota bruto yang seharusnya dibuat sesuai dengan PSAK No 27 Tahun 2009. KJKS Mambaul Hidayah menyajikan akun penjualan seperti laporan laba-rugi badan usaha lainnya. Sedangkan menurut PSAK No.27 tahun 2009, setiap pendapatan yang diperoleh dari anggota koperasi dianggap sebagai partisipasi bruto anggota, kemudian dikurang dengan beban pokok, kemudian dapat partisipasi neto anggota, itu yang seharusnya disajikan didalam laporan keuangan pada KJKS Mambul Hidayah yang sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009 tentang akuntansi perkoperasian sehingga tidak adanya pembagian yang jelas antara akun-akun yang seharusnya disajikan. Sementara KJKS Mambaul Hidayah telah berbadan hukum.

Sehingga dapat diuraikan bahwa unsur yang mempengaruhi hasil usaha dalam penyajian PHU pada koperasi sesuai PSAK No. 27 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1) Partisipasi anggota, merupakan kontribusi anggota kepada koperasi.

Unsur partisipasi anggota berasal dari penjualan barang atau jasa kepada anggota koperasi setelah dikurangi beban pokok dan menghasilkan partisipasi neto anggota. Partisipasi anggota sebesar Rp. 79.528.300,-.

- 2) Pendapatan dari non-anggota, merupakan kontribusi non-anggota kepada koperasi. Unsur pendapatan dari non-anggota berasal dari penjualan barang atau jasa kepada non-anggota koperasi setelah dikurangi harga pokok kemudian ditambahkan atau dikurangi dengan laba atau rugi kotor dengan non-anggota dan menghasilkan SHU kotor. Pendapatan non anggota KJKS Mambaul Hidayah tahun 2010 meliputi:

1. Penjualan bersih setelah baban pokok Rp.
21.122.000,-

Pendapatan jasa:

1. Pendapatan Jasa simpan pinjam Rp. 220.350.600,-
2. Jasa penjualan TBS Rp. 240.354.240,-
3. Jasa penjualan TBS luar Rp. 45.200.000,-
4. Jasa operasional Rp 15.345.000,-
5. Jasa BRI Rp. 3.115.250,-
6. Jasa Bank Riau Rp. 5.430.000,-
7. Jasa mobil Rp. 16.754.050,-

Jadi, partisipasi anggota dan pendapatan non anggota Rp. 637.200.000,- .

- 3) Beban operasi, merupakan beban atau pengorbanan koperasi dalam memperoleh barang atau jasa dalam menjalankan kegiatan koperasi. Unsur beban operasi berasal dari SHU kotor setelah dikurangi beban usaha, beban perkoperasian, ditambahkan atau dikurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain, ditambahkan atau dikurangi dengan pendapatan atau beban luar biasa, dikurangi pajak penghasilan dan menghasilkan SHU setelah pajak.

Beban usaha KJKS Mambaul Hidayah pada tahun 2010 meliputi:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Beban perjalanan dinas | Rp. 4.540.000,- |
| 2. Beban USP | Rp. 70.130.000,- |

Jadi, total beban usaha Rp. 74.670.000,- .

Beban perkoperasian KJKS Mambaul Hidayah tahun 2010 meliputi:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya gaji karyawan dan pengurus | Rp. 120.000.000,- |
| 2. Biaya konsumsi | Rp. 5.200.000,- |
| 3. Biaya Listrik | Rp. 3.084.000,- |
| 4. Biaya sewa kantor | Rp. 12.500.000,- |
| 5. Biaya perawatan mobil | Rp. 11.500.000,- |
| 6. Biaya penyusutan bangunan | Rp. 3.002.150,- |
| 7. Biaya penyusutan peralatan kantor | Rp. 6.250.000,- |
| 8. Biaya penyusutan peralatan usaha | Rp. 193.250,- |
| 9. Beban penyusutan kendaraan/mobil | Rp. 40.000.000,- |

Jadi, total beban perkoperasian Rp. 201.729.400,- .

Pendapatan lain-lain KJKS Mambaul Hidayah tahun 2010 meliputi:

1. Penjualan batu bata	Rp.	20.000.000,-
2. Penjualan semen	Rp.	10.950.000,-
3. Penjualan besi	Rp.	20.750.000,-
4. Penjualan koral	Rp.	17.250.450,-
5. Penjualan pasir	R	14.049.550,-

Total beban lain-lain **Rp. 82.000.000,- .**

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas peneliti menyajikan laporan perhitungan hasil usaha KJKS Mambaul Hidayah yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 Tahun 2009, tahun buku 2010 yang dapat dilihat pada tabel IV. 2 dibawah ini:

Tabel IV.2

KOPERASI KJKS MAMBAUL HIDAYAH
PERHITUNGAN HASIL USAHA SETELAH KOREKSI
31 Desember 2010 dan 2009

PARTISIPASI ANGGOTA		2010		2009
Partisipasi Bruto Anggota	Rp	881.999.557,-	Rp	750.000.000,-
Beban Pokok		<u>(802.471.257,-)</u>		<u>(669.050.500,-)</u>
Partisipasi Neto Anggota	Rp	<u>79.528.300,-</u>	Rp	<u>80.949.500,-</u>
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA				
Penjualan setelah dikurangi beban pokok	Rp	21.122.000,-		
Pendapatan jasa	Rp	536.549.700,-	Rp	452.500.500,-
Harga Pokok		<u>(-)</u>		<u>(-)</u>
Laba (rugi) Kotor dengan Non Anggota	Rp	557.671.700,-	Rp	452.500.500,-
Sisa Hasil Usaha	Rp	637.200.000,-	Rp	533.450.000,-
BEBAN OPERASI				
Beban Usaha		<u>(74.670.000,-)</u>		<u>(166.760.000,-)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp	562.530.000,-	Rp	366.690.000,-
Beban Perkoperasian		<u>(201.729.400,-)</u>		<u>(6.000.000,-)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp	360.800.600,-	Rp	360.690.000,-
Pendapatan dan Beban Lain-Lain		<u>82.000.000,-</u>		<u>51.040.000,-</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp	442.800.600,-	Rp	411.730.000,-
Pendapatan dan Beban Luar Biasa		<u>-</u>		<u>-</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp	442.800.600,-	Rp	411.730.000,-
Pajak Penghasilan		<u>-</u>		<u>-</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp	442.800.600,-	Rp	411.730.000,-

Sumber: Data Olahan 2012

D. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode

tertentu. PSAK No. 27 tahun 2009 secara khusus tidak mengatur mengenai Laporan Arus Kas, koperasi dapat menggunakan metode langsung dan tidak langsung sesuai dengan ketentuan PSAK No. 27 tahun 2009 tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara mengenai kebutuhan suatu badan usaha terhadap pemenuhan kas usaha. Dalam penyajian Laporan Keuangan KJKS Mambaul Hidayah belum melakukan pelaporan Arus Kas menurut ketentuan PSAK No. 27 tahun 2009 untuk mencantumkan Laporan Arus Kas sebagai kelengkapan atas laporan keuangan.

Dari analisis informasi Neraca tahun 2010 dapat disajikan Laporan Arus Kas KJKS Mambaul Hidayah dalam tabel IV.4 dibawah ini:

Tabel IV.4

KOPERASI KJKS MAMBAUL HIDAYAH
LAPORAN ARUS KAS SETELAH KOREKSI
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010

Dalam Rupiah	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	
442.800.600,-	
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	
Beban penyusutan	(49.445.400,-)
Kenaikan piutang usaha	(221.111.643,-)
Kenaikan piutang pinjaman anggota	(31.952.225,-)
Penurunan piutang pinjaman non-anggota	10.602.000,-
Kenaikan persediaan	(284.156.218,-)
Kenaikan pendapatan akan diterima	54.624.950,-
Kenaikan hutang Usaha	701.433.039,-
Penurunan biaya yang harus dibayar	(1.500.000,-)
Kenaikan simpanan sukarela	<u>8.020.000,-</u>
Arus kas dari aktivitas operasi.	
<u>186.514.503,-</u>	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	
<u>629.315.103,-</u>	
Arus kas aktivitas investasi	
Kenaikan aktiva tetap	(10.836.100,-)
Kenaikan aset dalam konstruksi	<u>(60.043.000,-)</u>
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	
(70.879.100,-)	
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penurunan hutang jangka panjang	(114.619.550,-)
Kenaikan simpanan wajib	2.500.000,-
Kenaikan cadangan	4.100.000,-
Pencairan SHU tahun lalu	<u>(411.730.000,-)</u>

Arus kas bersih digunakan untuk pendanaan

(519.749.550,-)

Kenaikan kas dan setara kas

38.686.453,-

Kas dan bank awal periode

400.296.580,-

Kas dan bank akhir periode

438.983.033,-

Sumber: Data Olahan 2012

E. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Penyajian laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan seberapa besar manfaat ekonomi uang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun dengan mencatat selisih antara harga pelayanan atau penjualan oleh koperasi dengan harga pasar wajar untuk setiap unit kegiatan koperasi, yang mencakup empat unsur yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk bagian sisa hasil usaha

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan.

Jumlah masing-masing laporan tersebut ditambah dan dilaporkan dalam satu periode akuntansi. Dalam KJKS Mambaul Hidayah belum menyajikan laporan promosi ekonomi anggota sebagai bagian dari laporan keuangan koperasi sehingga tidak diketahui seberapa besar manfaat yang diterima anggota sebagai bagian dari setiap unit usaha yang dijalankan koperasi.

Manfaat ekonomi dari pengadaan barang untuk anggota merupakan selisih harga pasar dengan harga koperasi. Harga pokok penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 872.349.700,- dan keuntungan yang ditetapkan koperasi dari harga koperasi penjualan yaitu 7% sehingga menjadi Rp. 61.064.479, -. Sedangkan pasar mengambil keuntungan sebesar 10% yaitu Rp. 87.234.970, -. Sehingga diperoleh manfaat ekonomi atas pengadaan barang untuk anggota tahun 2010 sebesar Rp. 26.170.491, -.

Manfaat ekonomi simpan pinjam koperasi merupakan selisih antara penghematan beban pinjaman anggota dan kelebihan balas jasa simpan pinjam anggota. Penghematan beban pinjaman anggota diperoleh dari selisih bunga pinjaman bank dan bunga pinjaman koperasi. Bunga pinjaman koperasi pada tahun 2010 sebesar 20% pinjaman anggota sebesar Rp. 841.611.925,- sehingga diperoleh bunga pinjaman sebesar Rp. 168.322.385,-. Sedangkan bunga pinjaman bank sebesar 25% setahun, sehingga diperoleh bunga pinjaman bank sebesar Rp. 210.402.198,-. Penghematan beban pinjaman anggota berjumlah Rp. 42.079.813,-.

Kelebihan balas jasa simpanan anggota merupakan selisih dari bunga simpanan bank dengan bunga simpanan koperasi. Jumlah simpanan di koperasi

pada tahun 2010 berjumlah Rp. 145.020.000,- dengan bunga diberikan 15% menjadi Rp. 21.753.000,-. Sedangkan bunga simpanan bank sebesar 13% sehingga menjadi Rp. 18.852.600,-. Selisih antara bunga simpanan koperasi dengan bank berjumlah sebesar Rp. 2.900.400,-. Gambaran lebih jelas dapat dilihat pada Tabel IV.5 dibawah ini:

Tabel IV.5
KJKS MAMBAUL HIDAYAH
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA SETELAH KOREKSI
Per 31 Desember 2010

PROMOSI EKONOMI DARI PEMASARAN ANGGOTA	2010 (Rp)
Pemasaran Produk anggota atas Dasar Harga Koperasi	-
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Pasar	-
Jumlah Promosi Anggota Ekonomi dari Transaksi Pemasaran produk Anggota	-
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA	
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	87.234.970,00
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(61.064.479,00)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	26.170.491,00
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI	
Penghematan beban Pinjaman Anggota	42.079.813,00
Kelebihan Balas Jasa Simpan Pinjam	(2.900.400,00)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Jasa	39.179.413,00

Untuk Anggota	39.179.413,00
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN	442.800.600,00
Pembagian SHU Tahun Berjalan Untuk Anggota	
	481.980.013,00
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	

Sumber: Data Olahan 2012

Jadi, dengan adanya laporan promosi ekonomi anggota diatas, memperlihatkan seberapa besar manfaat yang diterima anggota KJKS Mambaul Hidayah selama tahun 2010 dengan mencatat selisih antara harga penjualan dengan harga pasar wajar setiap unit kegiatan koperasi. Manfaat ekonomi dari pengadaan barang untuk anggota KJKS Mambaul Hidayah adalah sebesar Rp. 26.170.491,- sedangkan manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi adalah sebesar Rp. 39.179.413,- dan jumlah promosi ekonomi anggota KJKS Mambaul Hidayah untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 481.980.013,- .

F. Penyajian Catatan Atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos yang ada dalam neraca dan pos-pos yang ada di laporan perhitungan perhitungan hasil usaha. Penyajian catatan atas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

Untuk lebih jelas penulis akan menyajikan laporan catatan atas laporan keuangan yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 tahun 2009, tahun buku 2010 sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disajikan dengan dasar nilai historis. Angka-angka yang disebut dalam catatan atas laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung.

b. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian Laporan Arus Kas, kas dan setara terdiri dari saldo kas dan bank.

c. piutang

Piutang disajikan dengan nilai nominalnya.

d. Persediaan

Harga perolehan persediaan didasarkan pada seluruh pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan persediaan hingga siap dijual. Tetapi koperasi tidak pernah menggunakan metode apapun dalam menilai persediaan.

Seluruh persediaan barang dagangan (pupuk dan waserda) dinilai berdasarkan harga beli dalam periode tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan metode penilaian persediaan yang disajikan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*). Yaitu harga barang yang pertama masuk merupakan harga barang pertama yang keluar.

e. Piutang

Piutang disajikan dengan nilai nominalnya. Koperasi tidak pernah menetapkan piutang ragu-ragu. Karena semua piutang bisa ditagih.

f. Aktiva tetap

Harga perolehan aktiva tetap didasarkan pada seluruh pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan aktiva tetap hingga siap untuk digunakan. Metode yang digunakan untuk penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Aset	Metode Penyusutan	%Penyusutan/tahun
a. Bangunan	Garis Lurus	5%
b. Kendaraan	Garis Lurus	20%
c. Peralatan Usaha	Garis Lurus	12,5%
d. Peratan Kantor	Garis Lurus	12,5%

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Semua yang mengenai pengeluaran aktiva tetap dicatat sebagai pengeluaran pendapatan.

g. Pembagian SHU Tahunan

SHU dibagikan pada akhir tahun atau pada awal tahun berikutnya, sesuai dengan anggaran dasar. Dengan rincian sebagai berikut:

Cadangan	40%
Anggota Koperasi	40%
Dana pengurus	5%
Dana Karyawan	5%

Dana Pendidikan	5%
Dana Sosial	2,5%
Dana Pengurus Daerah Kerja	2,5%

h. Penjelasan Pos-pos Dalam Neraca

Kas Rp. 17.031.171,-

Berasal dari saldo kas per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas Umum	Rp. 7.031.171,-
- Kas USP	Rp. 3.637.500,-
- Kas Waserda	Rp. 6.362.500,-
Jumlah	<u>Rp. 17.031.171,-</u>

Bank Rp. 421.951.862,-

Berasal dari saldo Bank per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- Bank BRI Sei Apit	Rp. 210.000.062,-
- Bank Riau Sei Apit	Rp. 11.950.700,-
- Bank Riau Sei Pakning	Rp. 200.001.100,-
Jumlah	<u>Rp. 421.951.862,-</u>

Piutang Usaha Rp. 221.111.643,-

Berasal dari saldo Piutang Anggota per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Piutang Anggota Waserda	Rp. 140.111.200,-
-	Piutang Pupuk	Rp. 71.000.400,-
-	Piutang Waserda	Rp. 10.000.043,-
		<hr/>
		Rp. 221.111.643,-

Piutang Anggota Rp. 701.500.725,-

Berasal dari saldo Piutang Anggota per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Piutang Anggota Koperasi	Rp. 501.000.000,-
-	Piutang Anggota USP	Rp. 200.500.725,-
		<hr/>
	Jumlah	Rp. 701.500.725,-

Piutang Non Anggota Rp. 40.038.000,-

Berasal dari saldo Piutang Non Anggota per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Piutang USP	Rp. 40.038.000,-
		<hr/>
	Jumlah	Rp. 40.038.000,-

Persediaan Rp. 595.048.138,-

Berasal dari saldo Persediaan per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Persediaan Pupuk	Rp. 470.940.000,-
-	Persediaan Waserda	Rp. 125.108.138,-
	Jumlah	Rp. 595.048.138,-

Pendapatan Akan Diterima Rp. 54.624.950,-

Berasal dari saldo Pendapatan Akan diterima per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Dari anggota USP	Rp. 30.402.000,-
-	Dari Piutang Usaha	Rp. 13.311.500,-
-	Dari Piutang Waserda	Rp. 10.911.450,-
	Jumlah	Rp. 54.624.950,-

Aktiva Tetap Rp. 325.773.000,-

Berasal dari saldo Aktiva Tetap per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Tanah	Rp. 39.957.000,-
-	Bangunan	Rp. 60.043.000,-
-	Kendaraan/mobil	Rp. 200.000.000,-
-	Peralatan Usaha	Rp. 773.000,-
-	Peralatan Kantor	Rp. 25.000.000,-
	Jumlah	Rp. 325.773.000,-

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Usaha Rp. 791.433.039,-

Berasal dari saldo Hutang Usaha per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Hutang Pembayaran TBS	Rp. 20.100.500,-
-	Hutang USP	Rp. 530.104.000,-
-	Hutang Waserda	Rp. 292.128.539,-
-	Hutang pada pihak III Akun	Rp. 50.100.000,-
	Jumlah	Rp. 791.433.039,-

Biaya YMH Dibayar Rp. 1.960.000,-

Berasal dari saldo YMH Dibayar per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Kekurangan Bunga Bank	Rp. 705.000,-
-	Kekurangan Angsuran Mobil	Rp. 1.255.000,-
	Jumlah	Rp. 1.960.000,-

Simpanan Sukarela Rp. 145.020.000,-

Berasal dari saldo Simpanan Sukarela per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Simpanan Sukarela Anggota Koperasi	Rp. 50.000.000,-
-	Simpanan Sukarela USP	Rp. 85.000.000,-
-	Simpanan Sukarela Waserda	Rp. 10.020.000,-
	Jumlah	Rp. 145.020.000,-

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang pada Bank Riau Rp. 245.345.500,-

Berasal dari saldo Bank Riau per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Pada Bank Riau Sei Apit Rp. 110.850.500,-
- Hutang Pada Bank Riau Sei Pakning Rp. 135.595.000,-

Jumlah	Rp. 245.345.500,-
---------------	--------------------------

Hutang Modal Kerja dari Pemda Siak Rp. 620.075.361,-

Berasal dari saldo Hutang Modal Kerja Dari Pemda Siak per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Pada Persi (Permodalan Siak) Rp. 620.075.861,-

MODAL

Simpanan Pokok Rp. 15.000.000,-

Berasal dari saldo Simpanan Pokok Anggota per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- Simpanan Pokok Umum Koperasi Rp. 11.550.000,-
- Simpanan Pokok USP Rp. 3.450.000,-

Jumlah	Rp. 15.000.000,-
---------------	-------------------------

Simpanan Wajib Rp. 36.000.000,-

Berasal dari saldo Simpanan Wajib Anggota per 31 Desember 2010,
dengan rincian sebagai berikut:

-	Simpanan Wajib Umum Koperasi	Rp. 16.350.000,-
-	Simpanan Wajib USP	Rp. 19.650.000,-
	Jumlah	Rp. 36.000.000,-

Cadangan Rp. 30.000.000,-

Berasal dari saldo Cadangan per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai
berikut:

-	Simpanan Cadangan Umum Koperasi	Rp. 10.540.500,-
-	Simpanan Cadangan USP	Rp. 19.459.500,-
	Jumlah	Rp. 30.000.000,-

Hasil Usaha Tahun Berjalan Rp. 442.800.600,-

Jumlah saldo ini adalah Hasil Usaha Bersih KJKS Mambaul Hidayah selama
Tahun Berjalan (2010)

i. Penjelasan Pos Sisa Hasil Usaha

Penjualan Rp. 963.000.000,-

Berasal dari Total Penjualan selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai
berikut:

-	Penjualan Waserda	Rp. 363.000.000,-
-	Penjualan Pupuk	Rp. 600.000.000,-

Jumlah

Rp. 963.000.000,-

Harga pokok penjualan Rp. 872.349.700,-

Berasal dari Total Harga Pokok Penjualan selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Persediaan awal Waserda	Rp. 90.500.725,-
-	Persediaan Awal Pupuk	Rp. 156.450.000,-
	Jumlah	Rp. 246.950.725,-
-	Pembelian Waserda	Rp. 323.335.113,-
-	Pembelian Pupuk	Rp. 843.655.000,-
	Jumlah Pembelian	Rp. 1.166.990.113,-
-	Beban-beban Usaha Waserda	Rp. 3.207.000,-
-	Beban-beban Pupuk	Rp. 50.250.000,-
	Jumlah Beban-beban	Rp. 53.457.000,-
	Barang tersedia untuk dijual	Rp. 1.467.397.838,-
-	Persediaan Akhir Waserda	Rp. 125.108.138,-

-	Persediaan Akhir Pupuk	Rp. 470.940.000,-
	Jumlah Persediaan Akhir	Rp. 595.048.138,-
	Harga Pokok Penjualan	Rp. 872.349.700,-
	Laba Atas Penjualan	Rp. 90.650.300,-

Pendapatan Jasa Rp. 546.549.700,-

Berasal dari Total Pendapatan Jasa selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam	Rp. 220.350.600,-
-	Pendapatan fee Penjualan TBS	Rp. 240.354.240,-
-	Pendapatan Fee Penjualan TBS Luar	Rp. 45.200.000,-
-	Pendapatan Fee operasional	Rp. 15.345.000,-
-	Pendapatan Fee BRI	Rp. 3.115.250,-
-	Pendapatan Fee Bank Riau	Rp. 5.430.560,-
-	Pendapatan Jasa Mobil KJKS	Rp. 16.754.050,-
	Jumlah	Rp. 546.549.700,-

BEBAN OPERASI

Beban-beban Usaha Rp. 74.670.000,-

Berasal dari Total Beban-beban Usaha selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Beban perjalanan dinas	Rp. 4.540.000,-
-	Beban USP	Rp. 70.130.000,-
	Jadi, total beban usaha	Rp. 74.670.000,- .

Beban-beban Administrasi dan UmumRp. 201.729.400,- .

Berasal dari Total Beban-beban Administrasi dan Umum selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Biaya gaji karyawan dan pengurus	Rp. 120.000.000,-
-	Beban Konsumsi	Rp. 5.200.000,-
-	Beban Listrik	Rp. 3.084.000,-
-	Beban Sewa Kantor	Rp. 12.500.000,-
-	Beban Perawatan Mobil	Rp. 11.500.000,-
-	Beban Penyusutan Bangunan	Rp. 3.002.150,-
-	Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp. 6.250.000,-
-	Beban Penyusutan Peralatan Usaha	Rp. 193.250,-
-	Beban Penyusutan Kendaraan/mobil	Rp. 40.000.000,-
	Jumlah	Rp. 201.729.400,- .

Pendapatan Lain-lain Rp. 82.000.000,-

Berasal dari Total Pendapatan Lain-lain selama Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

-	Pendapatan Fee Penjualan Batu Bata	Rp. 20.000.000,-
-	Pendapatan Fee Penjualan Semen	Rp. 10.950.000,-
-	Pendapatan Fee Penjualan Besi	Rp. 20.750.000,-
-	Pendapatan Fee Penjualan Koral	Rp. 17.250.450,-
-	Pendapatan Fee Penjualan Pasir	Rp. 14.049.550,-
	Jumlah	Rp. 82.000.000,-

Sisa Hasil Usaha Rp. 442.800.600,-

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dalam bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penyusunan Neraca KJKS Mambaul Hidayah Kecamatan Sabak Auh Tahun 2010, KJKS Mambaul Hidayah memisahkan antara Kas dan Bank. Sehingga tidak sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 yang tidak memisahkan antara kas dan Bank. Pada hal kas dan bank sama-sama merupakan aktiva yang paling likuid.
2. Koperasi tidak melakukan pemisahan antara piutang usaha, piutang anggota dan non anggota. Sehingga tidak sesuai dengan PSAK NO. 27 Tahun 2009 yang membagi piutang menjadi piutang usaha, piutang anggota dan non anggota.
3. Koperasi tidak melakukan penyusutan terhadap nilai aktiva tetap seperti; bangunan, peralatan kantor, kendaraan/mobil. Sehingga nilai aktiva tetap terlalu tinggi dan tidak adanya beban penyusutan dan juga tidak sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 sebagai pedoman penerapan akuntansi perkoperasian di Indonesia.

4. Koperasi belum menyajikan Laporan Arus kas, sehingga tidak diketahui mengenai perubahan kas yang meliputi sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas.
5. Koperasi belum menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota, sehingga tidak diketahui manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari setiap unit kegiatan usaha koperasi selama satu tahun.
6. Dari unsur-unsur Laporan Keuangan yang harus disajikan menurut PSAK No. 27 Tahun 2009, KJKS Mambaul Hidayah hanya menyajikan Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan Laporan Arus Kas dan Promosi Ekonomi Anggota belum disajikan oleh koperasi. Sehingga koperasi tidak mengetahui peningkatan atau penurunan dari kas koperasi selama satu tahun dan juga anggota koperasi tidak mengetahui balas jasa yang diberikan koperasi terhadap anggotanya.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan dalam kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran kepada Koperasi KJKS Mambaul Hidayah sebagai berikut:

1. KJKS Mambaul Hidayah Kecamatan Sabak Auh seharusnya melakukan penggabungan antara kas dan bank dalam Laporan Neraca.
2. KJKS Mambaul Hidayah Kecamatan Sabak Auh seharusnya membedakan antara piutang usaha, piutang anggota dan piutang non anggota.

3. KJKS Mambaul Hidayah Kecamatan Sabak Auh seharusnya melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap.
4. Dalam menyusun Laporan Keuangan KJKS Mambaul Hidayah Kecamatan Sabak Auh seharusnya menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Laporan Arus Kas sangat penting untuk mengetahui perkembangan dari kas koperasi sendiri. Sedangkan Laporan Promosi Ekonomi anggota bertujuan untuk mengetahui seberapa manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota merupakan unsur dari Laporan Keuangan Koperasi di Indonesia yang dinyatakan dalam PSAK No. 27 Tahun 2009.
5. Dalam membuat Neraca sebaiknya lebih diperhatikan format yang benar sehingga memudahkan para pemakai informasi memahami isi dari neraca KJKS Mambaul hidayah.
6. Untuk membuat Laporan Keuangan yang benar dan akurat, harus ditunjukan dari sumber daya para pengurus KJKS Mambaul Hidayah. Untuk pengurus dan karyawan agar dapat dapat menambah pengetahuan tentang cara pembuatan Laporan Keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husein, Imam bin Hajjaj, Al Qusyairy An-Naisabury, 2002, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid IV*, Penerjemah, K.H. Adib Bisri Musthofa, CV. Asy Syifa', Semarang.
- Departemen Agama RI, 2003, *Alqur'an dan Terjemahan*, Penerbit PT. Karya Toha Putra: Semarang.
- Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini, 2009, *Akuntansi Keuangan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ginda, 2008, *Koperasi, Potensi Pengembangan Ekonomi*, Suska Press, Pekanbaru.
- Harahap, Sofian Syafri, 2002, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- *Harahap, Sofyan Safri, 2002, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ilham Wahyudi, Wiwin Yadiati, 2007, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jumingan, 2006, *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartosapoetra, G. Dkk, 2003, *Koperasi Indonesia*, Edisi Ke Enam, Bina Adiaksa dan Rineka Cipta, Jakarta.
- Kieso, Donald E, Jefri J Weaygand, 2002, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ke Tujuh, Jilid, Alih Bahasa, Herman Wibowo, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Pemerintah RI, *Undang-undang No. 25 1992 tentang Perkoperasian*, Lembaga Negara RI, Jakarta.

Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Edisi Pertama, Alih Bahasa, Sri Djatnika dan S. Arifin, Salemb Empat, Jakarta.

Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

Sitio Arifin, Tamba Halomoan, 2002, *Koperasi Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta.

Trisnawani, Tuti, 2009, *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Tunggal, Amin Widjaja, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Edisi Pertama, Rieka Cipta, Jakarta.

*Tunggal, Amin Widjaja, 2007, *Akuntansi Untuk Perusahaan Kecil dan Menengah*, Edisi Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Widiyanti, Ninik, 2002, *Manajemen Koperasi*, Edisi Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta.